

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil Analisis rasio keuangan daerah kinerja belanja daerah Kota Kupang tahun anggaran 2015-2019 termasuk dalam kategori cukup dengan persentase rata-rata yang dicapai sebesar 68.89%. Hasil ini dapat dilihat dari empat analisis rasio yakni Analisis Rasio Varians Belanja, Analisis Rasio Pertumbuhan Belanja , Analisis Rasio Keserasian Belanja dan Analisis Rasio Efisiensi Belanja, yang memperlihatkan yakni Kinerja Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2015-2019 berdasarkan tingkat perolehan Analisis Rasio Varians Belanja termasuk dalam kategori baik dengan nilai capaian rata-rata sebesar 89.37%; kemudian dilihat dari perolehan tingkat Pertumbuhan Belanja Daerah yang termasuk dalam kategori positif atau disukai dengan nilai capaian rata-rata sebesar 3.70%, berikutnya dilihat dari analisis rasio keserasian belanja yang termasuk kategori tidak serasi dengan nilai capaian rata-rata sebesar 19.86% dan dilihat dari analisis rasio efisiensi belanja yang termasuk kategori efisien dengan nilai capaian sebesar 66.30% .
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Kupang adalah:
 - a. Keterlambatan dalam peluncuruna Dana Alokasi Khusus
 - b. Penetapan Perda APBD yang terlambat,
 - c. Sengketa masyarakat

- d. Belum selesainya persiapan pelaksanaan kegiatan,
- e. Belum semua SKPD melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencanayang telah dituangkan dalam DPA-SKPD, sehingga banyak kegiatan yang baru dilaksanakan, yang menyebabkan penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran kemudian belum terciptanya tingkat efisiensi belanja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, maka saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya Pemerintah Kota Kupang Khususnya Badan Keuangan Daerah Kota Kupang semakin meningkatkan kinerja dalam pengelolaan belanja daerah secara khusus dan APBD secara umum. Dengan kinerja yang baik maka efektifitas, produktifitas dan efisiensi belanja juga akan semakin baik.
2. Perlu adanya perhatian lebih dari Pemerintah Kota Kupang terhadap belanja modal, karena dengan belanja modal yang digunakan untuk aset - aset tetap akan berguna dalam jangka panjang dan memberikan manfaat pada masa yang akan datang.
3. Hendaknya ada pengawasan bagi SKPD pelaksana agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan yang telah ditugaskan terutama pada belanja modal aset tetap lainnya, sehingga tidak adanya pelimpahan dana sisa atau lebih yang menyebabkan terjadinya pemborosan anggaran pada belanja modal aset tetap lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chriman Youlli Karinda Vantje Ilat Lidia Mawikere, Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2009-2012.
- Christian Kainde, 2003. *Analisis Varians dan Pertumbuhan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung*, Jurnal Emba, Vol 1 NO. 3
- Doddy Setiawan, 2017. Fenomena Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten/ Kota di Indonesia.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta: Selemba Empat.
- , 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Selemba Empat.
- Ignatia Avianti Matutina, Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah Majelis Rakyat Papua Kota Jaya Pura Tahun 2011-2015
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*
- Mahmudi (2010: 156). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, UPP STIM YKPN, Yogyakarta*
- Mahsun (2009: 25) . *Bastian, Indra, 2010, Akuntansi Sektor Publik, Edisi Ketiga, Erlangga, Yogyakarta*
- Moh, 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE, Yogyakarta*.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta.
- , 2004 . *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Sakina Nusarifa Tantri, Analisis Kinerja Belanja pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2016
- UU No. 24 Tahun 2015 *tentang Pemerintah Daerah*
- Warti Ratnasari, Analisis Kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Sosial Kabupaten Berau tahun 2016-2017.